

ABSTRAK

Eunike Br. Simanjuntak, Nim 3213311003, Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Medan. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan diskresi, serta mengevaluasi efektivitas pemberian diskresi dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan jenis penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian di Polrestabes Medan telah dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Diskresi diterapkan dengan orientasi pada perlindungan korban, melalui prosedur yang sistematis dan akuntabel. Namun, terdapat berbagai hambatan, baik internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, maupun eksternal yang berkaitan dengan stigma sosial dan tekanan dari keluarga. Efektivitas diskresi dinilai tinggi dalam mempercepat penyelesaian kasus dan memberikan perlindungan yang lebih humanis kepada korban. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada dukungan regulasi yang harmonis dan kapasitas penyidik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas penyidik, penyediaan fasilitas yang ramah korban, serta penguatan regulasi untuk mendukung pelaksanaan diskresi yang lebih optimal. Dengan demikian, diskresi kepolisian bukan hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Diskresi Kepolisian, Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Eunike Br. Simanjuntak, Nim 3213311003, Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Medan. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

This study aims to analyze the implementation of police discretion in handling sexual violence crimes at the Medan City Police Headquarters, identify factors inhibiting the implementation of discretion, and evaluate the effectiveness of granting discretion in handling sexual violence crimes at the Medan City Police Headquarters. This study uses a descriptive qualitative research method and a sociological juridical research type. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation studies. Data analysis techniques include data reduction, data display, and data verification. The research findings indicate that the implementation of police discretion at the Medan City Police Headquarters (Polrestabes) has been carried out in accordance with applicable legal principles, namely Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS). Discretion is implemented with a focus on victim protection, through systematic and accountable procedures. However, various obstacles exist, both internal, such as limited human resources and infrastructure, and external, related to social stigma and family pressure. Discretion is considered highly effective in expediting case resolution and providing more humane protection to victims. However, this success depends heavily on harmonious regulatory support and the capacity of investigators. This research recommends the need to increase investigator capacity, provide victim-friendly facilities, and strengthen regulations to support the more optimal implementation of discretion. Thus, police discretion functions not only as a law enforcement tool but also as an instrument for achieving substantive justice for victims of sexual violence.

Keywords: *Police Discretion, Law Enforcement, Sexual Violence*

